

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Bella Dian Nusantara¹, Teguh Yuwono², Tri Yuningsih³

Universitas Diponegoro^{1,2,3}

Belladian32@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada wilayah pariwisata Pantai Jakat. Studi ini menggunakan metode kualitatif, data penelitian bersumber data primer dan sekunder, untuk menganalisis data melalui tahapan kondensasi data, display data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari studi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah di wilayah pariwisata pantai Jakat Kota Bengkulu belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan Perda diterbitkan. Terkonfirmasi belum ada program pengurangan dan penanganan sampah dengan baik.

Kata Kunci: Manajemen sampah, partisipasi masyarakat, objek wisata

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the application of policy No. 2 of 2011 concerning Waste Management. However, this research only focuses on the tourism area of Jakat Beach. This study uses a qualitative method, the research data is sourced from primary and secondary data, to analyze the data through the stages of data condensation, data display, verification and drawing conclusions. The results of the study show that the application of regional regulation No. 02 of 2011 concerning waste management in the coastal tourism area of the Jakat City of Bengkulu has not fully proceeded according to the purpose of the issuance of the regional regulation. Confirmed that there is no program for reducing and handling waste properly.

Keywords: Waste management, community participation, tourist attraction

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi sektor unggulan bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia seiring dengan berkembangnya jumlah kunjungan wisatawan memperoleh pendapatan dari wisatawan (Anggrayini, 2022; Ulum & Suryani, 2021). Salah satu tujuan wisata favorit masyarakat Bengkulu salah satunya adalah pantai Pantai jakat. Pantai Jakat ini merupakan andalan wisata masyarakat provinsi Bengkulu secara umum, dan secara kota Bengkulu, hal ini karena objek Pantai Jakat berada tidak jauh dari pusat kota. Di sepanjang pesisir pantai kota Bengkulu banyak titik wilayah yang menjadi wilayah pariwisata, Jarak Pantai Jakat dengan pantai Panjang (objek wisata yang menjadi primadono) hanya berjarak 3 km. Dengan potensi tersebut, pantai Pantai Jakat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata.

Perkembangan kawasan wisata berdampak juga dengan lingkungan, ditambah lagi dengan berbagai aktivitas manusia di wilayah tersebut berakibat pada pencermaran lingkungan, misalnya terdapat sampah yang menumpuk di sana sini (Ali, 2021; Darmawi, 2017; Gunanti, Permana, & Gama, 2021). Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi sampah di wilayah pariwisata, dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan berupa UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan lain yang mengikuti secara teknis untuk melaksanakan UU tersebut. Bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah telah dilakukan oleh Lia puspiat dkk yang menjelaskan Pemerintah kota Bengkulu telah mengimplementasikan Perdatersebut cukup baik dengan indicator telah dilaksanakan sesuai standard dan prosedur (Sari, Thaap, & Darmi, 2021). UU tersebut diterbitkan dengan maksud agar kebersihan lingkungan tetap terjaga, dengan demikian akan memberikankenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Pantai Jakat. Namun beberpa kajian belum secara spesifek membahas penerapan kebijakan pada wilaya khusus seperti objek pariwisata.

Upaya pemerintah menjadikan kota Bengkulu sebagai daerah wisatawan mendapat tantangan yang berat, melihat masyarakat maupun pengunjung dalam membuang sampah tidak pada tempatnya, hal ini di lihat dari banyaknya sampah yang tidak dibuang ke tempatnya. Terbatasnya tong sampah (khususnya di sepanjang pantai Jakat) membuat sampah bertebaran. Pemda Kota Bengkulu berupaya untuk mengatasi permasalahan persampahan dengan menerbitkan peraturan turunan yang diakomodir oleh Pemda Kota Bengkulu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu. Pemerintah diamanatkan untuk memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana. Adanya perda No 02 tahun 2011 seharusnya mampu menghambat terjadinya penumpukan sampah di sepanjangpantai Tapak Paderi. Namun implementasi kebijakan Perda tersebut belum dilakukan secara maksimal. Pemerintah belum menyediakan sarana berupa tempatsampah dan kontainer sampah. Selain itu, belum ada pemisahan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya. Saat ini tempat sampah hanya tersedia atas inisiatifpelaku usaha yang sederhana seperti keranjang plastik atau karung bekas. Sementara itu pengakutan sampah masih belum terjadwal secara konsisten mengakibatkan tumpukan sampah yang menggunung. Hal ini sangat menarik untuk diamati, mengapa Perda Nomor 02 Tahun 2011 kota Bengkulu belumberjalan secara maksimal.

Untuk melihat suatu penerpaan kebijakan perlu mengkaji beberapa indicator sesuai konsep implementasni kebijakan. Model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu Implementasi kebijakan. Terdapat banyak model kebijakan untuk digunakan dalam menganalisis sebuah Implementasi kebijakan. Salah satunya model impelentasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang melihat Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan. Terdapat empat faktor yang berperan dalam pencapaian keberhasilan Implementasi kebijakan, yaitu faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Indikator dalam konsep ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi, keberhasilan Implementasi kebijakan mensyaratkan agarimplementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi Implementasi.

2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan maka Implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses Implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengImplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan pita merah atau yang biasa disebut dengan *red tape* ,yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Konsep tersebut di atas implementasi kebijakan dapat tercapai apabila point-point di atas dilakukan dengan baik. Keberhasilan terhadap suatu Implementasi, kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya manusia manusia merupakan Indikator yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan impelementasi. Kajian ini membahas secara singkat tentang bagaimanakah Pemerintah Kota Bengkulu dalam menerapkan Peraturan yang telah dibuat untuk mengatasi persampahan di kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Bengkulu. Sasaran penelitian ini adalah para petugas kebersihan, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang ada pada subjek penelitian menggunakan berbagai metode kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat. Data dikumpulkan dengan cara observasi. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dataprimer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berdasarkan hasil obersevasi. Kemudian data sekunder berupa penelitian terdahulu, laporan-laporan, berita media cetak maupun online dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi ulasan atau penjelasan terhadap data primer. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan melalui buku-bukureferensi, peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dokumentasi dari lembaga terkait yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi mendalam selama penelitian yang dilakukan, sampah telah menjadi fenomena alam yang ada di Pantai Tapak Paderi. Salah satu obyek wisata di Kota Bengkulu adalah pantai Jakat yang penuh dengan sampah limbah aktivitas para pengunjung dan sampah pedagang setempat. Berdasarkan data di lapangan terdapat beberapa sumber sampah sebagai berikut :

1. Sampah bersumber dari penduduk. Pantai Jakat bersentuhan dengan muara sungai kecil, teridentifikasi ada 2 muara sungai kecil dan 1 muarasungai besar yakni sungai Bengkulu. Sampah tersebut hanyut ke bibir pantai. Pada saat gelombang naik sampah terlihat berserakan di beberapa wilayah pantai Jakat.
2. Sampah bersumber dari pelaku usaha mikro. Hasil aktivitas pelaku usaha menghasilkan berbagai macam sampah, ada sampah rumah tangga, batok kelapa, kulit pisang dan lainnya, ada juga sampah plastic berupa krecek kantong, bekas minuman dan lainnya.
3. Sampah bersumber dari pertanian (alam) berupa rumput-rumputan, ranting-ranting dan beberapa batang yang cukup besar.
4. Terdapat limbah baru bara, yang hanyut dari sungai Bengkulu dan bergeser ke beberapa bagian wilayah pantai Jakat.

PEMBAHASAN

Dari berbagai sumber sampah ini maka hendaknya pemerintah kota Bengkulu dapat menerapkan Perda tersebut dengan berbagai cara diantaranya, pemerintah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana seperti isi Perda Nomor 02 Tahun 2011. Kemudian masyarakat hendaknya membangun rasa kepedulian untuk membuang sampah pada tempatnya jika sarana dan prasarana telah dilengkapi. Sehingga upaya pemerintah dalam proses pengelolaan sampah selanjutnya dapat lebih efektif dan mudah.

Upaya pemerintah menjadikan kota Bengkulu sebagai daerah wisatawan mendapat tantangan yang berat, melihat masyarakat maupun pengunjung dalam membuang sampah tidak pada tempatnya, hal ini di lihat dari banyaknya sampah yang tidak dibuang ke tempatnya. Terbatasnya tong sampah (khususnya di sepanjang pantai Jakat) membuat sampah bertebaran.

Pemerintah diamanatkan untuk memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana. Adanya perda No 02 tahun 2011 seharusnya mampu menghambat terjadinya penumpukan sampah di sepanjang pantai Jakat. Untuk tertibnya pengelolaan sampah pemerintah kota Bengkulu menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan. Unit ini yang menangani persampahan di wilayah kotaBengkulu termasuk wilayah objek pariwisata Pantai Jakat. Namun penerapan kebijakan Perda yang dilaksanakan oleh organisasi yang ditunjuk Walikota belum dapat dikatakan optimal. Organisasi yang dibentuk oleh Walikota belum melaksanakan pengelolaan sampah secara terintegrasi dan terpadu.

Data di lapangan mengkonfirmasi bahwa penampungan sampah belum dilakukan dengan baik hal ini dapat dilihat seberapa tinggi komitmen Pemerintah Kota dapat menyediakan tempat sampah. Pemerintah kota belum menyediakan sarana berupa tempat penampungan sampah yang memadai dan mobil kontainer yang siap mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pola pengumpulan sampah belum dilakukan dengan baik, organisasi yang dibentuk Walikota belum menunjuk tim teknis pada wilayah pariwisata Pantai Jakat, sehingga sampah yang bersumber dari penduduk dan pertanian atau alam belum dikelola dengan baik. Sepanjang tahun 2022 unit organisasi pemerintah kota tidak melakukan gotong royong untuk memberikan Pantai Jakat.

Selain itu, belum ada pemisahan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya. Saat ini tempat sampah hanya tersedia atas inisiatif pelaku usaha yang sederhana seperti keranjang plastik atau karung bekas. Sementara itu pengangkutan sampah masih belum terjadwal secara konsisten mengakibatkan sampah yangmenumpuk.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah di jelaskan di atas,

Pemerintah Kota Bengkulu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud adalah berkewajiban untuk melakukan pembatasan timbunan sampah dengan cara menyediakan angkutan untuk mengirim sampah ke TPA. Pendaaur ulangan sampah, sampah yang ada di sekitar pantai jakat didaur ulang sehingga dapat bernilai ekonomi, dan memanfaatkan kembali, misal sampah bekas minuman dapat dijadikan pot-pot bunga, sehingga akan menambah keindahan lingkungan.

Untuk mengurangi volume sampah sebaiknya unit pengelola persampahan kota Bengkulu sebaiknya menetapkan target pengurangan sampah dalam waktu yang ditentukan, misal per triwulan. Selain itu, pemerintah kota Bengkulu menyiapkan fasilitas untuk penggunaan teknologi, bisa berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi (Yuniningsi, Darmi, & Sulandari, 2019). Dalam berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi pemerintah daerah membuat program penggunaan teknologi daur ulang sampah dan menyiapkan fasilitas serta pasar pengguna hasil daur ulang. Kemudian yang terpenting bagaimana pemerintah kota dapat merangkul penduduk atau masyarakat di sekitar yang dapat berperan penting dalam mengurangi dan menangani sampah (Darmi & Aryanti, 2022). Terutama pengelolaan daerah pesisir pantai penting adanya patnership agar pengelolaan daerah pantai dapat optimal (Darmi, 2017).

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pengelolaan sampah di Pantai Jakat Kota Bengkulu telah dilakukan dengan menerbitkan Perda Nomor 02 Tahun 2011. Namun bagaimanakah penerapan Perda No 02 Tahun 2011 tersebut untuk pengurangan volume sampah dan penanganan sampah. Perda inimemberikan petunjuk agar pengelolaan samapah dilakukan dengan paradigma memanfaatkan sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Paradigma ini dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sampah dijadikan kompos atau pupuk, sampah plastik dibuat kerajinan tangan dan sebagainya. Dalam Perda nomor 2 Tahun 2011 tersebut pemerintah kota diharapkan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana penanganan sampah oleh LPM untuk tahap awal menjadi tanggung jawab pemerintah Kota.
2. Sarana dan prasarana penanganan sampah untuk tahap selanjutnya menjadi tanggung jawab LPM. Lalu Perda No. 02 tahun 2011 (pasal 6)menjelaskan tentang pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting karena keindahan wisata pantaiJakat bergantung dari pengunjung pantai yang harus menjaga kebersihan, adanya sarana prasarana yang memadai mampu mendorong pengunjung pantai lebih bijak dalam membuang sampah pada tempatnya.
3. Belum adanya jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan secara terjadwal mengakibatkan tumpukan sampah di pinggir pantai.

SIMPULAN

Semua Negara di belahan dunia mengalami an untuk mengatasi sampaha terutama di Negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Oleh sebab itu pemerintah telah membuat peraturan – peraturan dan petunjuk teknis untuk mengatasi sampah. Pemerintah daerah kota Bengkulu melakukan hal sama, telah terbit peraturan peraturan untuk instrumen dalam mengatasi persampahan di kota Bengkulu, namun hal belum dikatakan berhasil, unit organisasi/unit teknis yang ditunjuk belum melakukan upaya yang terintegrasi dan terpadu antara organisasi, hukum, masyarakat dan Perguruan Tinggi. Harapannya unit teknis dapat melakukan secara berantai sesuaiperaturan dengan pola menampung/menyiapkan tempat sampah, mengumpulkan, memindahkan, mengangkut dan memproses serta megelola sampah di TPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2021). Perilaku Pedagang Warung Jajanan Dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun 2021. *Journal of Nursing and Public Health*, 9(2), 38–46.
- Anggrayini, N. (2022). Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. *Magenta*, 10(2), 61–82.
- Darmawi, A. (2017). Potensi Timbulan Sampah Pada Objek Pariwisata Baru di (Potentials Of Waste Drinking in New Tourism Object in Regency Bantul Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan Teknologi Industri*, 9(1), 61–71.
- Darmi, T. (2017). Capacity Building Resource Management Of Coastal Areas To Improve The Local Economic Based By Cross-Cutting Partnerships: Case Study on Panjang. Darmi, T. (2017). Capacity Building Resource Management Of Coastal Areas To Improve The Local Economic Based By . *Earth and Environmental Science*. Retrieved from <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/55/1/012045/meta>
- Darmi, T., & Aryanti, M. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN WISATA PANTAI. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 3(2), 101– 107.
- Gunanti, A. A. I. I. P., Permana, G. P. L., & Gama, A. W. O. (2021). Kolaborasi antara bank sampah dan masyarakat desa kedewatan dalam pengelolaan sampah rumah tangga bernilai ekonomis. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04(18), 188–195.
- Sari, L. P., Thaap, J., & Darmi, T. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(2).
- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1), 14–24.
- Yuniningsi, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 84–93.